



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUNU ANDRIANI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **845974**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.784.000.000

1. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
WARISAN Rp. 77.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 377.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/45 m2 di KAB / KOTA
BARITO KUALA, WARISAN Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1079 m2/467 m2 di KAB / KOTA
PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/45 m2 di KAB / KOTA
KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 491 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI
Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 273 m2/176 m2 di KAB / KOTA
KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/163 m2 di KAB / KOTA
KAPUAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
9. Tanah Seluas 1438 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
10. Tanah Seluas 1438 m2 di KAB / KOTA PULANG PISAU, HASIL
SENDIRI Rp. 75.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/120 m2 di KAB / KOTA
PULANG PISAU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 660.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER PRADO TXL 2.7 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 773.700.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 880.178.867

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.097.878.867

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.097.878.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD YANI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 788914

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	93.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	93.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	97.500.000

III. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	97.500.000
--	-----	------------

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMELIA PUSPITA DIARDINI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 473038

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	7.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	22.500.000
III. HUTANG	Rp.	76.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-53.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.